

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inovasi teknologi di era globalisasi yang semakin modern dan maju menyebabkan persaingan dunia usaha semakin kuat sehingga memaksa perusahaan untuk terus berkembang agar dapat mempertahankan bisnisnya (Aprilia et al., 2022). Suatu perusahaan diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas usahanya, selain itu perusahaan juga melakukan lebih banyak usaha untuk menarik investor salah satunya dengan meningkatkan daya saing diberbagai sektor. Hal ini menyebabkan perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaanya karena kinerja keuangan perusahaan merupakan hal mendasar yang diperhatikan oleh investor saat mengevaluasi suatu perusahaan, sehingga calon investor mampu mengambil keputusan yang tepat untuk menginvestasikan dananya (Aprilia et al., 2022).

Kinerja perusahaan menggambarkan baik buruknya posisi keuangan perusahaan dengan bantuan alat analisis keuangan sehingga mencerminkan prestasi kerja perusahaan untuk periode tertentu. Dasar untuk mengevaluasi kesehatan perusahaan dilaksanakan melalui analisis kinerja keuangannya (Aprilia et al., 2022). Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat seberapa jauh perusahaan telah menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan yaitu menggunakan rasio keuangan seperti rasio *profitabilitas*.

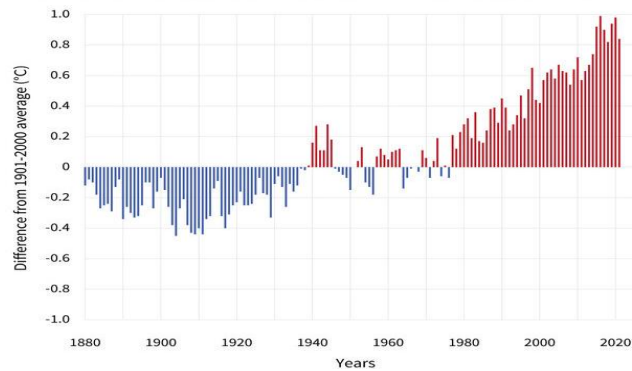
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan baik dalam penjualan maupun investasi (Fahmi, 2017a). *Profitabilitas* bisa diukur dengan beberapa indikator seperti *Return on Assets*, *Return on Equity*, dan *Net Profit Margin*. *Return on Assets* dapat menunjukkan

seberapa baik kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba dalam suatu periode (Florenxia & Handoko, 2021), *Return on Equity* digunakan untuk menilai keandalan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari investasi pemegang saham (Maulida, 2021), sedangkan *Net Profit Margin* digunakan untuk mengukur jumlah laba bersih sesudah pajak kemudian membandingkannya dengan volume penjualan (Sujarweni, 2017).

Kinerja keuangan digunakan untuk menggambarkan bagaimana bisnis telah dijalankan dan apa yang sudah dicapai perusahaan, selain itu kinerja keuangan merupakan ukuran keberhasilan perusahaan dari sudut pandang keuangan dan merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk memperoleh modal (Khairunisa & Pohan, 2022). Sedangkan menurut (Fahmi, 2017a) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip kaidah keuangan yang benar. Misalnya, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK, GAAP dan standar serta peraturan lainnya. Namun sayangnya, masih banyak perusahaan yang tidak peduli terhadap dampak lingkungan dan social dari usahanya karena hanya ingin memaksimalkan keuntungan (Meiyana & Aisyah, 2019). Selain mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, perusahaan harus menerapkan prinsip *corporate governance* yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Pemanasan global adalah salah satu dampak lingkungan yang diabaikan oleh banyak perusahaan yang sedang menjadi isu politik dan bisnis di berbagai Negara (Khairunisa & Pohan, 2022). Pemanasan global (*global warming*) merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer global (Pratama & Parinduri, 2019). Suhu bumi meningkat sebesar $0,08^{\circ}\text{C}$ per dekade sejak tahun 1880, sementara laju pemanasan meningkat dua kali lipat sebesar $0,18^{\circ}\text{C}$ per dekade sejak tahun 1981 (Lindsey, R & Dahlman, 2022). Gambar 1.1 menunjukkan suhu rata-rata pemanasan global dari tahun 1880-2020.

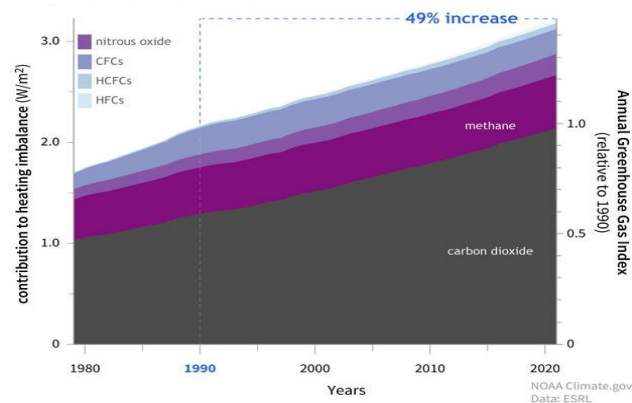
Gambar 1. 1
Suhu Rata-Rata Pemanasan Global



Sumber: climate.gov

Gambar diatas menunjukkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi yang disebabkan oleh gas rumah kaca (GRK). Gas yang tergolong sebagai gas rumah kaca adalah Karbon Dioksida (CO_2), Metana (CH_4), Nitrous Oksida (N_2O), Hidrokarbon (HFCS), Perfluorocarbon (PPCS), dan Sulfur HeksafLOURIDA (SF_6) (Basuki, 2016). AGGI (*Annual Greenhouse Gas Index*) menggabungkan efek pemanasan gas rumah kaca antropogenik utama dan membandingkannya dengan kondisi pada 1990, pada tahun 2021 AGGI akan mencapai peningkatan 49% efek rumah kaca dibandingkan tahun 1990 dimana atmosfer saat ini menyerap energi 3,22 watt per meter persegi permukaan bumi (Lindsey, 2022) Gambar 1.2 menunjukkan efek GRK terhadap pemanasan global.

Gambar 1. 2
Efek Gas Rumah Kaca Terhadap Pemanasan Global



Sumber: climate.gov

Pemaparan data dan fenomena diatas menunjukkan bahwa gas rumah kaca memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan seperti terjadinya perubahan iklim, penipisan lapisan ozon dan lain sebagainya. Menanggapi hal tersebut Negara-negara di dunia mengadakan konvensi Rio de Janeiro yang menghasilkan forum hukum berupa UNFCCC lalu dibentuk Protokol Kyoto 1997 yang dijelaskan dalam Pasal 2 UNFCCC yaitu untuk menetralkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer (Syihabuddin & Ruhaeni, 2022). Indonesia sebagai Negara peserta dari Protokol Kyoto juga merespon hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Pratifri & Zulaikha, 2016).

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang mengalami peningkatan emisi yang cukup besar karena adanya aktivitas industri, total emisi GRK di Indonesia tahun 2019 sebesar 1,86 miliar ton CO₂, dari jumlah tersebut sektor energi menjadi penyumbang emisi terbesar yaitu 638,8 juta ton CO₂ (Ahdiat, 2022). Kemudian pada tahun 2021 emisi GRK nasional tercatat 259,1 Juta ton CO₂ dan diperkirakan akan meningkat 29,13% menjadi 334,6 Juta CO₂ pada tahun 2030 (Rizaty, 2022), yang menjadi penyebab tingginya emisi karbon adalah penggunaan bahan bakar fosil seperti gas bumi, minyak bumi, dan batu bara (Pratama & Parinduri, 2019).

Perusahaan sebagai penyumbang emisi terbesar tidak hanya bertanggung jawab atas kinerja keuangannya tetapi juga atas dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sebagai akibat dari penggunaan sumber daya alam dalam operasinya atau *corporate social responsibility* (CSR). CSR merupakan usaha perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari kegiatan bisnis dalam ekonomi, masyarakat, dan lingkungan (Cahyono & Rachmaniyah, 2020). Penerapan *Corporate social responsibility* diharapkan akan mengacu pada pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya mengatakan bahwa pembangunan generasi saat ini seharusnya tidak memerlukan kompromi dari

generasi mendatang berupa pengorbanan kesejahteraan, ekonomi, sosial dan lingkungan. (Suparmoko, 2020). Perusahaan dapat memberikan efek positif dan negatif terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh sebab itu, perusahaan dapat mengungkapkan kinerja perusahaan, salah satu terkait lingkungan seperti pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*).

Pengungkapan emisi karbon merupakan hal yang penting bagi para *stakeholder* karena sebagai bentuk transparansi perusahaan terhadap tindakan yang dilakukan dalam mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Pengungkapan emisi karbon juga akan menjadi *goodnews* bagi para investor karena merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan karena banyak investor yang hanya akan tertarik kepada perusahaan yang peduli terhadap lingkungannya. Pengungkapan emisi karbon diatur dalam UU PT No. 40, Pasal 66 C Tahun 2007, yang mewajibkan PT untuk melaporkan kegiatan tanggung jawab lingkungan dan sosialnya dalam laporan tahunan, dan Surat Edaran OJK No. 30 /SEOJK .04 / 2016 tentang komitmen perusahaan untuk mencantumkan laporan tanggung jawab lingkungan dan sosial dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) (Rusmana & Purnaman, 2020). Selain itu, dalam pasal 4 Perpres No. 61 Tahun 2011 Republik Indonesia tentang Rencana Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca, disebutkan bahwa pelaku ekonomi turut berkontribusi dalam pengurangan gas rumah kaca. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengungkapkan emisi karbon, para pelaku usaha diharapkan lebih transparan dalam melaporkan emisi karbon dari seluruh kegiatan usahanya (Solikhah et al., 2018).

Pengungkapan emisi karbon adalah masalah yang sedang berkembang di beberapa negara, termasuk Indonesia. Pengungkapan emisi karbon merupakan bagian dari informasi lingkungan. Di Indonesia pengungkapan informasi lingkungan diatur dalam PSAK No. 1 (revisi 2019) poin 14 yang berbunyi: “Sejumlah perusahaan turut menyediakan laporan keuangan, laporan lingkungan dan nilai tambah, terutama bagi sektor-sektor dimana faktor lingkungan adalah hal yang penting dan ketika karyawan adalah pengguna gelar dengan peran penting”

(Amaliyah & Solikhah, 2019). Tabel 1.1 menunjukkan rata-rata pengungkapan emisi karbon Indonesia berdasarkan studi sebelumnya.

Tabel 1. 1
Rata-Rata Pengungkapan Emisi Karbon di Indonesia

No	Nama	Sampel	Unit Analisis	Rata-Rata Pengungkapan
1	Prasetya & Yulianto (2018)	Perusahaan Non-Keuangan Peringkat PROPER	126	0,35
2	Yanto & Halimah (2018)	Perusahaan Pertambangan	56	0,24
3	Solikhah <i>et al.</i> (2018)	Perusahaan Manufaktur	160	0,19
4	Amaliyah & Solikhah (2019)	Perusahaan Non-Keuangan	127	0,26
5	Trufvisa & Ardiyanto (2019)	Perusahaan Manufaktur	160	0,28
6	Dewi & Kurniawan (2020)	Perusahaan Indeks KOMPAS 100		
		Industri Insentif karbon	180	0,35
		Industri Non-Insentif karbon	70	0,21
7	Pratama (2021)	Perusahaan Non-Keuangan	340	0,25
8	Alfayerds & Setiawan (2021)	Perusahaan Manufaktur Peringkat PROPER	105	0,15
9	Firmansyah <i>et al.</i> (2021)	Perusahaan Manufaktur	260	0,45
10	Dani & Harto (2022)	Perusahaan Indeks SRI-KEHATI	82	0,42

Sumber: Data diolah, 2023

Penyajian data rata-rata pengungkapan emisi karbon Indonesia di atas menunjukkan hasil yang kurang optimal. Penelitian Halimah & Yanto (2018) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan 56 observasi menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan emisi karbon hanya 0,24. Angka tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi emisi karbon, hal ini terhambat oleh kurangnya transparansi dalam publikasi laporan bisnis, perusahaan berpersepsi

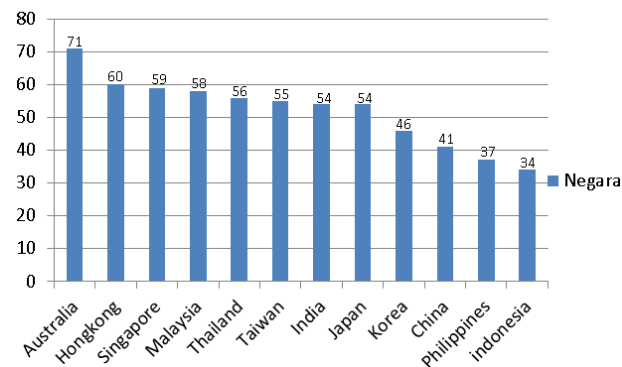
bahwa terdapat biaya yang tinggi terkait dengan pengungkapan emisi karbon serta pengungkapan emisi karbon bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) (Basuki, 2016).

Penerapan tata kelola yang baik tetap menjadi inti dari perkembangan lingkungan bisnis Indonesia, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tata kelola perusahaan yang baik atau selanjutnya disebut *Good Corporate Governance* dianggap salah satu kunci keberhasilan pertumbuhan berkelanjutan dan daya saing perusahaan dalam persaingan global, terutama bagi perusahaan publik (Saifi, 2019). Menerapkan *Good Corporate Governance* bisa mendisiplinkan manajemen ketika mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi pemegang saham dan kreditur secara efektif serta memberi kepercayaan kepada investor untuk menerima pengembalian yang wajar atas investasi mereka. Perusahaan yang dikelola dengan baik membutuhkan pengawasan yang efektif dan efisien, semakin baik kualitas tata kelola, semakin lemah perilaku oportunistik manajer. Keuntungan menggunakan *Good Corporate Governance* mampu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menciptakan pengambilan keputusan lebih baik yang menegaskan kembali bahwa operasi perusahaan tidak hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang tata kelolanya (Clarissa & Rasmini, 2018). Tata kelola yang buruk berdampak pada krisis ekonomi dan profitabilitas. Investor menyukai kinerja perusahaan yang baik, stabil (Masithoh & Dewayanto, 2020).

Implementasi GCG di Indonesia dimulai sejak tahun 2002 setelah krisis pada tahun 1998-1999. Pelaksanaan GCG berpedoman pada Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang “ Penerapan GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)” yang dimutakhirkan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara (Wahyudi, 2021). Namun pada kenyataannya praktik *Good Corporate Governance* masih jauh dari kata menggembirakan. Berdasarkan survei Asian *Corporate Governance Assosiation* (ACGA) pada 12 negara pada tahun 2018

terhadap pelaku bisnis, Indonesia menempati posisi terendah sebagai Negara yang menerapkan *Corporate Governance* sebagaimana terlihat pada gambar 1. 3.

Gambar 1. 3
Skor Peringkat Good Corporate Governance di Asia



Sumber: Asian *Corporate Governance* Assosiation (ACGA)

Gambar di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Negara-negara Asia lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di Indonesia belum maksimal, padahal kinerja perusahaan tidak akan berkelanjutan kecuali didasarkan pada praktik manajemen yang baik. Selain itu, *annual report* yang didukung oleh penerapan *good corporate governance* mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* memerlukan struktur pengelolaan untuk mencapai tujuan pengawasannya (Prihanto, 2018). Dalam penelitian ini struktur pengelolaan diproyeksikan dengan dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit. Jumlah dewan direksi yang tidak mematuhi aturan atau belum melaksanakan proses *self assessment* dapat menurunkan tingkat pengawasan manajemen dan kinerja keuangan. Persentase komisaris independen yang tidak memiliki ikatan keuangan dan keluarga mampu mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen, selain itu kurangnya pengawasan dewan komisaris dapat mempengaruhi efisiensi.

Kurangnya komite audit dalam suatu perusahaan dapat menyebabkan terjadinya kecurangan. Audit eksternal dilakukan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan bebas dari salah saji material (Eksandy, 2018).

Struktur kepemilikan (*ownership structure*) adalah bagian dari mekanisme pelaksanaan *Corporate Governance* yang menjelaskan tentang proporsi kepemilikan saham perusahaan, dan bagaimana tindakan yang dilakukan para pemegang saham (Petta & Tarigan, 2017). Struktur kepemilikan dalam penelitian ini diproxykan oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham pada suatu perusahaan oleh kelompok atau individu (Sugianto & Sjarief, 2018). Kepemilikan ini bisa dimiliki oleh dewan komisaris perusahaan dan direktur (Maulana et al., 2021), kepemilikan manajerial mampu memotivasi manajemen untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan karena memiliki andil dalam keuntungan yang dihasilkan perusahaan (Sugianto & Sjarief, 2018). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi lainnya dan pemerintah yang diharapkan dapat mempengaruhi pemanfaatan aktiva perusahaan dan sebagai pencegahan terhadap pemborosan (Eksandy, 2018). Terjadinya peningkatan dalam pengawasan yang maksimal terhadap pihak manajemen disebabkan oleh dorongan investor institusional, hal ini mengakibatkan kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Petta & Tarigan, 2017). Sedangkan kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham oleh badan atau perorangan yang berada di luar negeri. Dengan adanya kepemilikan asing tentunya berdampak positif bagi perusahaan karena perusahaan tersebut mendapat pengawasan dari pemilik yang etos kerjanya berbeda dengan Negara asal perusahaan. Dibandingkan kepemilikan domestik,

kepemilikan asing lebih mampu meredam konflik antara manajemen perusahaan dan pemegang saham (Al-Gamrh et al., 2020).

Chen Kelvin, Fransiskus E. Daromes, dan Suwandi Ng (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengungkapan Emisi Karbon Sebagai Mekanisme Peningkatan Kinerja Untuk Menciptakan Nilai Perusahaan. Penelitian dilakukan terhadap seluruh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, kinerja operasional dan biaya ekuitas.

Muhammad Saifi (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan terhadap perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return On Assets*.

Arry Eksandy (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syari'ah Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan dewan direksi, komisaris independen, dewan pengawas syari'ah dan komite audit berpengaruh terhadap ROA (*Return on Assets*).

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky Mazaya & Zuni Barokah (2022) dengan judul Dampak Emisi Karbon Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan di Indonesia Dan Malaysia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa emisi karbon tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Shofiyatul Masithoh & Totok Dewayanto (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa jumlah dewan komisaris dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Nabila Putri Deswara, Astrie Krisnawati, & Rr. Sri Saraswati (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional sebagai proksi dari variabel Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA yang dijadikan sebagai indikator pada variabel kinerja keuangan.

Ilham Maulana, Muhammad Alkirom Wildan & Nurita Andriani (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Dimoderasi Oleh Karakteristik Dewan Komisaris. Hasil penelitian menunjukkan struktur kepemilikan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

Penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya tentang pengungkapan emisi karbon, struktur pengelolaan, dan struktur kepemilikan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga menimbulkan *research gap*. Jadi, penulis ingin membuktikan apakah pengungkapan emisi karbon, struktur pengelolaan, dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Muhammad Saifi (2019). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel *Corporate Governance* yang diproxy dengan dewan komisaris independen, struktur kepemilikan diproxy dengan proporsi kepemilikan institusional dan manajerial kemudian kinerja keuangan diukur dengan indikator *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA) sedangkan dalam penelitian ini variabel struktur pengelolaan yang diproxy dengan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen dan ukuran komite audit, struktur kepemilikan diproxy dengan proporsi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing kemudian kinerja keuangan diukur

dengan indikator *Return on Asset* , *Return on Equity* dan *Net Profit Margin* selain itu dalam penelitian ini juga menambahkan satu variabel eksogen yaitu pengungkapan emisi karbon, alasan peneliti memilih variabel pengungkapan emisi karbon karena perusahaan juga harus bertanggungjawab atas lingkungan sebagai dampak operasinya. Perbedaan kedua terletak pada populasi penelitian, jika penelitian sebelumnya menggunakan populasi dari perusahaan property dan *real estate* sedangkan dalam penelitian ini menggunakan populasi yang berasal dari perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sektor energi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Berdasarkan perhitungan Inventarisasi Gas Rumah Kaca nasional tingkat emisi pada 2019 sekitar 1,86 miliar ton CO₂, dari jumlah tersebut sektor energi menjadi penyumbang emisi terbesar yaitu 638,8 juta ton CO₂ (Ahdiat, 2022). Perbedaan ketiga terletak pada periode penelitian, jika penelitian sebelumnya menggunakan periode 2011-2015 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode 2019-2021, alasan peneliti menggunakan periode yang terbaru karena lebih mencerminkan keadaan perusahaan saat ini.

Pemaparan data dan fenomena di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon, Struktur Pengelolaan, Dan Struktur Kepemilikan, Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pengungkapan Emisi Karbon berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan?
2. Apakah Struktur Pengelolaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan?
3. Apakah Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap kinerja keuangan perusahaan
2. Untuk membuktikan pengaruh struktur pengelolaan terhadap kinerja keuangan perusahaan
3. Untuk membuktikan pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau pembanding bagi peneliti selanjutnya.
2. Bagi Peneliti, penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi (SE) program Strata Satu (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dan sebagai sarana untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
3. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan memberi manfaat mengenai variabel-variabel yang dapat meningkatkan kinerja keuangan dan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
4. Bagi Calon Investor, penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi para calon investor ketika mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan sebelum membuat keputusan investasi pada perusahaan tersebut.